

BAB II

Sinergi Belt and Road Initiative (BRI) dan Egypt Vision 2030

2.1. Sejarah dan Hubungan Tiongkok - Mesir

Mesir adalah negara Afrika pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok, pada tahun 1956. Selama lebih dari setengah dekade, kedua negara telah berhasil mempertahankan kemitraan politik dan ekonomi yang solid dan menghadirkan model yang efektif dari kerja sama Selatan-Selatan yang berhasil. Pada tahun 1953, Dengan pengakuan Mesir atas Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1956, berbagai bentuk kerja sama baru tersedia. Pada tahun 1961 kedua Negara mulai hubungan diplomatiknya, kemudian Pada tahun 1964, kedua pemerintah menandatangani kesepakatan kerjasama ekonomi dan teknis di Beijing. Pada tahun 1985, perjanjian perdagangan baru ditandatangani, yang menetapkan bahwa perdagangan bilateral akan diselesaikan dengan pertukaran luar negeri yang dapat dikonversi sejak saat itu (Michael B, 2010).

Pada Maret 1995, kedua negara menandatangani perjanjian ekonomi dan perdagangan untuk menggantikan perjanjian perdagangan 1985 yang memperlancar dan meningkatkan perkembangan perdagangan bilateral antara kedua negara. Tiongkok dan Mesir menandatangani kesepakatan untuk menghindari pajak ganda dan penghindaran pajak pada Agustus 1997. Pada tahun yang sama, kedua pemerintah menandatangani letter of intent tentang kerjasama teknis dan ekonomi yang saling

menguntungkan untuk mendorong perusahaan Tiongkok mendirikan usaha patungan di Mesir. Pada 2006, kedua negara menandatangani nota kesepahaman dan sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan, tuan rumah Forum Kerjasama Tiongkok-Afrika dengan tujuan memperdalam jenis baru kemitraan strategis antara kedua belah pihak untuk pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan Perdagangan bilateral mencapai sekitar \$4 miliar dolar AS pada tahun 2007 (Ministry of Foreign Affairs, 2007).

Peristiwa ini dapat dianggap sebagai era baru perdagangan ekonomi dan kerja sama ekonomi antara Tiongkok dan Mesir. Kedua belah pihak sepakat untuk lebih meningkatkan kerja sama di bidang bea cukai, perpajakan, inspeksi dan karantina, dan untuk menyimpulkan dan menerapkan perjanjian kerja sama yang relevan untuk pengembangan perdagangan Cina-Mesir yang sehat. Sebuah pusat perdagangan komoditas Afrika akan didirikan di Tiongkok dan kebijakan preferensial seperti pengurangan biaya dan goyah akan diadopsi untuk ikut serta dalam perusahaan Mesir yang akan mempromosikan ekspor komoditas Mesir ke Tiongkok (Hatab, 2012).

Mesir termasuk di antara pendukung *Belt and Road Initiative* yang diusulkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013. Dukungan ini muncul dari keyakinannya bahwa ini adalah inisiatif global yang unik di dunia internasional yang akan ditempa oleh para mitra sendiri untuk mengambil keuntungan dari apa yang ditawarkan globalisasi dan multilateralisme berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan dan menghormati (Al-Ahram, 2021).

Mesir tidak dapat melewatkan inisiatif besar ini, Mesir dianggap sebagai pintu gerbang utama ke Afrika dan Timur Tengah dengan mengendalikan salah satu jalur laut terpenting di dunia. Terusan Suez untuk memperluas kapasitas jalur laut ini, serta Proyek Pengembangan Wilayah Terusan Suez dan peluang yang dihidirkannya kepada dunia. Mesir bertekad untuk bekerja sama dengan Tiongkok untuk mewujudkan inisiatif global ini. Yang kemudian membuat saling ketergantungan transendental yang berkembang antara kedua negara di bawah kepemimpinan. Presiden Abd El Fattah El Sisi dan Presiden Xi Jinping. Yang memiliki visi bersama untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara, terutama setelah dukungan Tiongkok terhadap keinginan rakyat Mesir. Dukungan inilah yang menyebabkan Presiden El Sisi mengunjungi Tiongkok enam kali sejak 2014. Hal ini digabungkan dengan strategis bersama di tingkat menteri luar negeri yang diluncurkan pada tahun 2014 dan kunjungan Presiden Xi Jinping ke Mesir pada tahun 2016. Hal ini segera memberi jalan pada keputusan bersama untuk lebih meningkatkan kemitraan strategis komprehensif agar sesuai dengan perkembangan zaman (xinhua, 2016).

2.2. Belt and Road Initiative

Sejak strategi Belt and road initiative diumumkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping pada 2013, kebijakan BRI terdiri dari dua komponen, yakni *the Silk Road Economic Belt* dan *the 21st Century Maritime Silk Road*. Kebijakan BRI dirancang untuk mencapai tujuan ekonomi dan soft diplomasi. BRI akan membangun koridor jalan dan kereta *programming interface* langsung antara Asia Timur dan Eropa, di

samping serangkaian pelabuhan laut yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, Timur Tengah dan Eropa. BRI diyakini dapat menghasilkan perdagangan yang komprehensif dengan mendorong perdagangan dan ekspor antar negara-negara yang dilintasi BRI, yang kemudian mendorong pembangunan ekonomi di seluruh kawasan Negara yang bergabung dalam BRI (PWC 2016).

Tiongkok telah berencana untuk berinvestasi dalam ekonomi dan mengirim intelektual Tiongkok ke negara yang bergabung dalam BRI, dalam upaya membangun infrastruktur dan pusat produksi yang menguntungkan Tiongkok dan negara yang bergabung dalam BRI (Hingga 2016). Selain manfaat ekonomi dari strategi tersebut, BRI juga memberikan keuntungan diplomatik yang signifikan, kebijakan BRI dikembangkan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memperdalam kerjasama internasional dan mempromosikan perdamaian dunia melalui *investasi respective* yang berkelanjutan dan saling ketergantungan ekonomi (Hingga 2016).

Melalui *Asian Infrastructure Venture Bank (AIIB)*, cabang investasi dari kebijakan OBOR, Tiongkok bermaksud untuk mempromosikan kemitraan untuk mengatasi masalah pembangunan infrastruktur. Karena membangun infrastruktur bersama ini memfasilitasi negosiasi diplomatik yang ekstensif dan peluang pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi negara-negara mitra, Tiongkok percaya bahwa strategi tersebut meningkatkan citra territorial mereka di antara negara-negara

mitra BRI strateginya dimaksudkan untuk tujuan ekonomi dan diplomatik yang murni, (Ferdinand 2016).

Selain tujuan internasional resminya, inisiatif OBOR juga memiliki fokus domestik yang signifikan. Jaringan rute perdagangan komprehensif yang dikembangkan sebagai bagian dari inisiatif BRI ini dapat menghubungkan Tiongkok dengan banyak pasar yang sudah maju dan berkembang, menciptakan peluang yang signifikan bagi industri Tiongkok (Fasslabend 2015). Tiongkok percaya bahwa membuka perdagangan ke pasar baru dengan menopang pertumbuhan ekonomi negara itu di masa depan, sementara juga meningkatkan standar hidup sebagian besar penduduk Tiongkok (Ferdinand 2016). Selain membalikkan penurunan tingkat pertumbuhan negara, *Belt and Road* dipandang sebagai usaha untuk meningkatkan tingkat konsumsi domestik dan mengimbangi kelebihan kapasitas manufaktur Tiongkok (PwC 2016).

Pendanaan BRI akan dijamin dengan berbagai mekanisme kelembagaan seperti: kebijakan Bank yang diwakili oleh *Agricultural Development Bank of China (ADBC)*, *China Development Bank (CDB)*, *Export-Import Bank of China (CHEXIM)* Kedua, Bank Milik Negara seperti *Agricultural Bank of China (ABC)*, *Bank of China (BOC)*, *China Construction Bank (CCB)* *Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)* ketiga, Dana Milik Negara seperti dari *China Investment Corporation (CIC)*, *Silk Road Fund (SRF)*. Keempat, Lembaga Pembiayaan Internasional seperti Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) dan Bank

Pembangunan Baru (NDB). Untuk sepenuhnya mendanai proyek BRI yang diperkirakan mencapai 4 hingga 8 triliun \$USD, saluran pendanaan yang beragam seperti obligasi BRI, investasi swasta dan kemitraan publik-swasta (KPS), tetapi juga investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan sangat penting untuk keberhasilan BRI (Ibold, 2019).

2.3 Egypt Vision 2030

Mesir terletak di Afrika Utara, dengan seluas sekitar 1,002 juta km² dan memiliki populasi sekitar 109, 3 juta (worldbank, 2021) Pada tahun 2021, PDB Mesir mencapai 404, 1 miliar \$USD, ekonomi Mesir mempertahankan pertumbuhan Diperkirakan dengan laporan tahunan terbaru laporan yang diterbitkan oleh Global Monetary Asset (IMF) bahwa Mesir adalah negara terpadat dan salah satu ekonomi terbesar di kawasan Arab (egypt, 2021).

Pada Juni 2014, Menteri Pertahanan Sisi menjadi presiden baru Mesir. Setelah Sisi menjadi presiden, Sisi mengabdikan dirinya untuk memulihkan stabilitas nasional dan merevitalisasi ekonomi, dan memperkenalkan sejumlah reformasi ekonomi dan rencana pembangunan, seperti proyek pembangunan koridor Terusan Suez, pembangunan ibu kota baru dan proyek zona ekonomi pengembangan segitiga emas Mesir dan sebagainya. Setelah lebih dari dua tahun persiapan, pemerintah baru secara resmi meluncurkan strategi pembangunan berkelanjutan “Visi Mesir 2030” pada 2016 (Calabrese, 2020).

Pada Februari 2016, proyek dalam *Egypt vision 2030* menjadi lebih dari 70 proyek dalam rencana visi Mesir. visi Mesir bertujuan untuk menempatkan Mesir di antara 30 negara teratas di dunia dalam hal ukuran ekonomi (berdasarkan pada PDB), daya saing pasar, pembangunan sumberdaya Manusia, dan kualitas hidup pada tahun 2030 dimulai dari aspek ekonomi dengan pembangunan ekonomi, Mesir dapat menjadi pasar ekonomi dengan ekonomi makro yang stabil dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, dapat bersaing dalam ekonomi, berperan efektif dalam perekonomian dunia dan Mesir memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan, dan dapat menyediakan lapangan kerja dan peluang kerja untuk masyarakatnya hingga tahun 2030 (Bohl D. K., 2018).

Egypt vision 2030 didasarkan pada konsep pertumbuhan yang berkelanjutan dan pembangunan infrastruktur yang menyeluruh, memastikan partisipasi semua orang dalam proses pembangunan berkelanjutan untuk kepentingan Mesir. Selain itu, visi Mesir memperhitungkan prinsip-prinsip kesempatan yang sama, menjembatani beberapa kesenjangan pembangunan, pemanfaatan sumberdaya secara optimal. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama dalam pembangunan berkelanjutan Mesir (MOPMAR, 2022).

Pemerintah Mesir juga menerapkan serangkaian reformasi yang dirancang untuk memulihkan stabilitas makro dan mikro ekonomi. Ini menggambarkan pentingnya perubahan untuk menstabilkan sistem ekonomi Mesir yang telah dilihat oleh IMF sebagai kekuatan lebih untuk ekonomi Mesir (IMF, 2017). Reformasi ini juga

dimasukkan ke dalam Strategi Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Mesir hingga 2030 (Bohl D. K., 2018).

2.4. Masalah dan capaian *Egypt vision 2030*

Dalam penelitian ini Mesir menggunakan analisis dari IFs sebagai indikator tantangan dan capaian *Egypt vision 2030*, di tahun 2030 menggunakan penelitian Frederick S. Pardee yang dinamakan International Futures (IFs). Analisis Frederick S. Pardee dapat membantu pemerintah, berpikir secara strategis tentang masa depan. *Pardee center for international futures* berfokus pada mengeksplorasi tren pembangunan masa lalu, memahami hubungan timbal balik yang mendorong hasil pembangunan, dan membentuk kebijakan yang mencapai hasil pembangunan (Bohl D. K., 2018).

International Futures (IFs) adalah alat kuantitatif sumber terbuka untuk memikirkan masa depan jangka panjang. membantu untuk memahami dinamika di dalam dan di seluruh sistem global, dan untuk berpikir secara sistematis tentang tren potensial, tujuan dan target pembangunan. Serta untuk berpikir dalam pembuatan kebijakan. Meskipun tidak ada perangkat analisis yang dapat memprediksi masa depan dengan akurat. dalam penelitian ini akan berfokus pada *data cross historic* dengan memberikan perbandingan dengan pertumbuhan di masalalu dan negara lain melalui tingkat pertumbuhan yang sama dengan Mesir pada tahun sebelumnya kemudian di bandingkan dengan tingkat pertumbuhan Mesir dalam kurun waktu 2015 - 2030 (Bohl D. K., 2018).

Menurut *United Nations Department of Economic and Social Affairs* (UNDESA, 2017). Selama beberapa dekade terakhir, kemiskinan ekstrem telah menurun. Persentase penduduk yang hidup dengan kurang dari \$1,90 per hari dibawah garis kemiskinan ekstrim telah menurun dari 7,4 persen pada tahun 1990 menjadi 1,3 persen pada tahun 2015. Namun, IF memperkirakan bahwa sekitar 22 persen populasi Mesir hidup dengan kurang dari \$3,10 dolar per hari. Dan menurut Badan Pusat Mobilisasi dan Statistik Publik (CAPMAS), 27,8 persen dari penduduk Mesir hidup di bawah garis kemiskinan nasional Mesir pada tahun 2015 kemiskinan diproyeksikan menurun pada tahun 2030 sebanyak 16,7 juta masyarakat Mesir hidup dengan kurang dari \$3,10 dolar per hari pada tahun 2030 dan lebih dari 340 ribu orang masih hidup dalam kemiskinan ekstrim (CAPMAS, & UNICEF, 2017).

sekitar 8,8 juta orang Mesir 9,4 persen dari populasi Mesir berada di kelas menengah antara \$10 sampai \$50 dolar per hari menurut standar internasional pada tahun 2015. Ini diproyeksikan meningkat hampir tiga kali lipat menjadi 24,4 juta 19,9 persen pada tahun 2030. Demikian pula, populasi batas kelas menengah pendapatan dengan antara \$3,10 dan \$10 per hari diproyeksikan meningkat dari 49 juta menjadi lebih dari 66 juta pada tahun 2030 (Bohl D. K., 2018).

Antara tahun 2000 dan 2010, PDB Mesir tumbuh sekitar 5 persen per tahun, memuncak pada 7,2 persen pada 2008, sementara pertumbuhan per kapita meningkat rata-rata 3 persen setiap tahun. Antara 2010 sampai 2015, rata-rata pertumbuhan PDB turun menjadi 2,9 persen, dan selama periode pertumbuhan per kapita rata-rata hanya

0,5 persen per tahun. Meskipun terjadi perlambatan, ekonomi Mesir tetap menjadi salah satu yang terbesar di Timur Tengah yang memiliki PDB mencapai \$329,4 miliar dolar tahun 2015. Ekonomi Mesir diproyeksikan tumbuh antara 5 dan 6 persen, setelah 2015 yang dapat mencapai PDB \$571 miliar pada tahun 2030. PDB per kapita diproyeksikan tumbuh dari \$1.250 perbulan pada tahun 2015 menjadi \$1.270 perbulan pada tahun 2030 (Bohl D. K., 2018).

Pertumbuhan ini diperkirakan mengarah pada pengurangan kemiskinan dan perluasan kelas menengah. Sepuluh juta lebih sedikit orang akan hidup dalam kemiskinan (sebagaimana didefinisikan oleh penduduk yang hidup di garis kemiskinan nasional Mesir, dengan penghasilan kurang dari \$3,40 dolar per hari pada tahun 2015) sedangkan kelas menengah (mereka yang hidup dengan \$10 sampai \$50 dolar per hari) diperkirakan akan meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2030 (Bohl D. K., 2018). Namun peningkatan ini juga dapat membawa masalah baru karena Kelas menengah yang berkembang sering kali mengharapkan peningkatan kualitas layanan publik yang lebih baik (Wietzke & Sumner, 2014).

Mesir juga menghadapi tantangan ekonomi seperti kurangnya pekerjaan informal, pengangguran. Tenaga kerja informal diperkirakan menurun dari sektor kerja non-pertanian dari 47 persen pada 2018 menjadi 36 persen pada tahun 2030. Namun, karena pertumbuhan penduduk, dan tambahan 2,5 juta orang yang membutuhkan pekerjaan di sektor informal laporan tahun 2016 dari Brookings Institute mengemukakan beberapa penjelasan potensial untuk tingginya tingkat pengangguran

dan ekonomi Mesir belum mampu menyediakan lapangan dan pos tenaga kerja. Usia kerja rata rata Mesir (usia 15-64) berjumlah 13,2 juta pada tahun 1980 menjadi 31 juta pada tahun 2015 dan diproyeksikan mencapai 41 juta orang pada tahun 2030. Para pekerja ini akan perlu diserap ke dalam perekonomian (Ghafar, 2016).

Pasar tenaga kerja Mesir secara tradisional didominasi oleh sektor publik, produk dari kebijakan yang dimulai pada 1950-an dan 1960-an yang mempromosikan pekerjaan sektor publik dan menjamin pekerjaan pemerintah untuk lulusan universitas (Richards, 1992). Permintaan tenaga kerja mengalami kemunduran dari waktu ke waktu karena terbukti bahwa sektor publik tidak secara berkelanjutan menyerap jumlah lulusan universitas yang terus meningkat (Assaad, 1995). Selain itu, kebijakan ini merugikan di sektor swasta, karena kurangnya budaya kewirausahaan yang kuat, pembiayaan modal yang tersedia terbatas, peraturan perizinan yang tidak jelas, dan undang-undang antimonopoli yang lemah yang menguntungkan perusahaan besar dan perusahaan yang terhubung secara politik serta gagal melindungi usaha kecil dan menengah (Ghafar, 2016).

Di tempat kerja tenaga kerja formal, banyak pendatang terpaksa mencari pekerjaan informal (Assaad & Krafft, 2013). Menurut IF pada tahun 2015, 51 persen tenaga kerja Mesir beroperasi informal, dan ekonomi informal mencapai 20 persen dari PDB. (Bohl, 2015) Pada tahun 2030, 40 persen tenaga kerja masih mencari pekerjaan di sektor informal. Ini merupakan hambatan yang signifikan bagi produktivitas ekonomi dan pendapatan pemerintah (La Porta & Shleifer, 2014). Pada tahun 2015, IF

memperkirakan bahwa pendapatan pemerintah tidak termasuk dana bantuan Hibah, maraknya korupsi menyumbang dalam menurunnya pendapatan pemerintah, yang hanya menghasilkan 25 persen dari PDB, yang menempatkannya di belakang negara tetangga seperti Aljazair (40 persen), Tunisia (31 persen), dan Maroko (30 persen) (Cavatorta, 2018).

Pendapatan pemerintah Mesir sebagai bagian dari PDB diproyeksikan meningkat hingga tahun 2030 tetapi akan tetap berada di antara terendah di wilayah Afrika Utara. Selain mempengaruhi aliran pendapatan pemerintah secara langsung, korupsi dapat mendorong aktifitas perekonomian ke sektor informal (Weitzman, 1997). Pada tahun 2015, IF memperkirakan bahwa 51 persen dari tenaga kerja Mesir bekerja di sektor informal, di belakang Palestina (56,2 persen) di antara negara-negara Timur Tengah. Pada tahun 2030, pekerjaan informal diproyeksikan turun menjadi 40 persen, meskipun jumlah orang yang bekerja secara informal terus bertambah (Bohl D. K., 2018).

Sebagian besar penurunan pendapatan per kapita didorong oleh meningkatnya populasi terhadap pasokan sumberdaya alam yang terbatas. Dalam menagtasi masalah ini harus mendapatkan hasil tinggi dalam produksi dalam negeri, ditambah dengan meningkatnya permintaan energi, Sementara tantangan-tantangan ini ada dalam kondisi saat ini, dampaknya dapat dikurangi melalui peningkatan efisiensi pertanian dan investasi dalam energi terbarukan (The Economist, 2016).

Mesir diproyeksikan akan semakin bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan energinya. IEA memproyeksikan permintaan energi untuk terus melampaui produksi energi dan pasokan domestik. mencakup penyesuaian produksi energi yang dibuat untuk membuka ladang gas baru di 2015. Meskipun secara historis Mesir merupakan pengeksport minyak bersih, Mesir telah bergantung pada impor minyak sejak pertengahan 2000-an karena menurunnya produksi dan meningkatnya permintaan (Adly, 2016).

Pada tahun 2003, Mesir mulai mengeksport gas alam ke negara tetangga negara-negara di Timur Tengah, namun pada tahun 2015 telah menjadi importir gas bersih. Gas menjadi semakin penting bagi energi Mesir, terhitung sekitar 50 persen dari total penggunaan energi Mesir. Sebanyak 60 persen pasokan gas Mesir digunakan untuk pembangkit listrik, dengan sisanya memasok kebutuhan industri, perumahan, dan kebutuhan komersial (Tsafos, 2015). Total produksi energi dalam negeri sementara mampu memenuhi permintaan Mesir saat ini, namun diproyeksikan tidak akan memenuhi kebutuhan energi Mesir hingga tahun 2030 (IEA, 2017) Produksi energi terbarukan, yang rata-rata hanya sekitar 2 persen dari total produksi Mesir selama dua dekade terakhir, diproyeksikan akan tumbuh lambat hanya mencapai 2,5 persen dari total produksi pada tahun 2030 (Bohl D. K., 2018).

Dalam permasalahan sumber daya alam termasuk ketersediaan makanan, air, dan energi, Mesir menghadapi serangkaian pilihan yang akan menentukan ketersediaan sumber daya alam Mesir untuk masa depan. Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan

pendapatan berarti bahwa Mesir harus menghasilkan energi yang lebih untuk memenuhi permintaan dalam negeri untuk memenuhi permintaan. Dan energi terbarukan meskipun merupakan peluang untuk mendiversifikasi ketersediaan energi, namun tidak dapat diproyeksikan cukup untuk menutupi kekurangan bahan bakar fosil. Pada saat yang sama, perluasan irigasi akan menambah beban di Sungai Nil, satu-satunya sumber air tawar Mesir. meskipun memiliki beberapa tingkat hasil pertanian tertinggi di dunia, produksi pangan tidak diproyeksikan untuk memenuhi permintaan pangan dalam negeri (Bohl D. K., 2018).

Mesir sudah mengeksploitasi sumber daya air terbarukan secara berlebihan dan harus berbagi air dari lembah Sungai Nil dengan sepuluh negara lain. Menambahkan irigasi mungkin menjadi pilihan yang tidak berkelanjutan bagi Mesir dalam jangka panjang. Pilihannya mengimpor ketahanan pangan dan energi, dari produksi dalam negeri dan subsidi, dan ancaman kelangkaan air, sementara makanan dan energi tidak mencukupi produksi (Bohl D. K., 2018).

Dengan berfokus pada pembangunan Ekonomi pada tujuan Visi Mesir 2030, IF memberikan gambaran masa depan dengan melihat Mesir mengambil pendekatan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. perekonomian Mesir lebih terbuka dan menarik bagi investor asing, sehingga terjadi peningkatan perdagangan dan arus masuk FDI. Pemerintah fokus pada perbaikan lingkungan bisnis dan perdagangan serta perluasan investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D). Dengan begitu perdagangan dan produksi Mesir akan meningkat dari 34 persen PDB pada tahun 2018

menjadi hampir 40 persen pada tahun 2030, investasi asing tumbuh dari 43 persen dari PDB menjadi 55 persen pada tahun 2030. Dengan meningkatkan pengeluaran untuk R&D, dari 0,04 persen PDB pada 2018 menjadi 0,19 persen PDB pada 2030 Yang akhirnya, dapat membuat mesir siap untuk membuka kesempatan kerja, dengan meningkatkan keberagaman dalam sektor produksi di tahun 2030 mencapai level Moldova pada tahun 2018 dengan pendapatan rata rata perkapita mencapai 4,2\$ USD perhari (Bohl D. K., 2018).

2.5. Kesadaran Mesir terhadap *Belt and Road Initiative*

Belt and Road Initiative” disambut oleh Mesir segera setelah diumumkan oleh Tiongkok dan Mesir menjadi negara pertama yang bergabung dengan proyek tersebut. Pada tahun 2014, Mesir secara resmi mengumumkan untuk mendukung “*Belt and Road initiative*” yang diluncurkan oleh Tiongkok. Presiden Mesir yang baru terpilih, sebelum kunjungan resmi pertamanya ke Tiongkok, menyatakan bahwa “*Belt and Road Initiative* Tiongkok merupakan peluang kerja sama antara Tiongkok dan Mesir, dan Mesir bersedia berpartisipasi secara aktif” (Chen, 2018). Menyadari pentingnya Inisiatif tersebut. Perdana Menteri Mesir mengatakan, “*Belt and Road Initiative* dapat menyatukan Tiongkok dan negara-negara berkembang di Afrika untuk mencapai pembangunan bersama. Mesir menganggap Inisiatif itu penting bagi negaranya. Duta Besar Mesir untuk Tiongkok menyatakan bahwa “*Belt and Road Initiative* telah membawa peluang ke Mesir” (Chen, 2018).

Inisiatif ini juga mendapat perhatian dari media Mesir. Presiden surat kabar AlAhram menegaskan bahwa, “*Belt and Road Initiative* telah mengangkat nilai simbolis yang besar dari Jalur Sutra kuno untuk memperkuat kerja sama ekonomi, kesetaraan dan keuntungan bersama atas dasar keadilan dan perdamaian, dan visi Maritim Abad ke-21. Jalur Sutra menjadikan Inisiatif ini benar-benar internasional dan tidak hanya terbatas pada negara-negara di sepanjang Jalur Sutra kuno” (Said, 2016).

Para cendekiawan Mesir juga memandang investasi Tiongkok penting bagi Mesir. Salah Abu-Zeed berpendapat bahwa Inisiatif ini didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan dan akan memainkan peran penting dalam pembangunan Mesir. Dia menambahkan bahwa, Inisiatif akan membawa perdamaian dan stabilitas, kerja sama dan integrasi. Dengan demikian, ini mengungkapkan persepsi positif Mesir terhadap BRI, dan tanggapan aktifnya terhadap Inisiatif Tiongkok di wilayah Timur Tengah dan wilayah Afrika (Abu-Zeed, 2017).

Mesir dan Tiongkok memiliki potensi besar untuk kerjasama ekonomi dan perdagangan. Mesir diberkati dengan sumber daya pariwisata yang sangat baik dan sejumlah besar orang Tiongkok memilih untuk melakukan perjalanan ke Mesir setiap tahun Mesir kaya akan cadangan mineral dan batu, dan perusahaan Tiongkok dapat mengembangkan sumber daya atas alam yang dimiliki Mesir dengan dasar saling menguntungkan dan timbal balik. (Chen, 2018)

Lingkungan Mesir yang stabil dan damai menarik lebih banyak pariwisata dan investasi asing, sehingga mendukung perekonomian negara. Mesir telah menyiapkan

rencana pemulihan nasional di mana Tiongkok memainkan peran penting. Tiongkok dan Mesir memiliki potensi besar untuk kerjasama investasi. Inisiatif Pembangunan Tiongkok memainkan peran penting dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas, khususnya dalam meningkatkan kerja sama politik dan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi makro Mesir yang positif, kedua negara secara bertahap memperkuat kerja sama di bidang politik, ekonomi, dan komersial, pemerintah Mesir telah menandatangani serangkaian perjanjian dengan pemerintah Tiongkok dalam rangka membina hubungan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara. (Aiping, 2018)

2.6. Kesadaran Tiongkok terhadap “*Egypt Vision 2030*”

Egypt Vision 2030 adalah rencana pembangunan yang diumumkan oleh pemerintah Mesir pada tahun 2014. Segera diluncurkan oleh Mesir, Tiongkok menyambut dan mengumumkan untuk mendukung “*Egypt Vision 2030*” dan mensinergikan proyek BRI dan *Egypt Vision 2030*. Pada bulan September 2017, selama BRICS Xiamen Pada KTT, Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam pertemuannya dengan Presiden Mesir Sisi berpendapat bahwa: “Kita perlu mensinergikan strategi pembangunan dan memanfaatkan pembangunan infrastruktur dan kerja sama kapasitas untuk menjadikan Mesir sebagai negara pendukung di sepanjang *Belt and Road Initiative*” (Beijing Daily, 2017).

Pada pertemuan Forum Kerjasama Cina-Arab ke-8 di Beijing pada Juli 2018, Menteri Luar Negeri Tiongkok mengumumkan bahwa pemerintah Tiongkok tertarik untuk mendorong kerjasama antara strategi pembangunan Tiongkok dan *Egypt Vision*

2030' dan mengundang Mesir untuk berkontribusi untuk pembangunan bersama proyek BRI dan meningkatkan kerja sama dalam kemampuan pengembangan kapasitas (TiongkokNews, 2018).

Pada September 2018, Presiden Sisi Mesir menghadiri KTT Forum Kerjasama Cina-Afrika di Beijing dan juga mengadakan pembicaraan dengan Presiden Xi Jinping. Dalam KTT tersebut, perdana menteri Tiongkok menganggap Mesir sebagai mitra yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan, dan menyatakan kesediaannya untuk mensinergikan BRI dan, mendorong kerjasama kedua negara dan memperkuat kerjasama dan strategi pembangunan mereka (Xinhua News, 2018).

Selain itu, dalam wawancara bersama dengan media Tiongkok sebelum dimulainya KTT, Duta Besar Tiongkok untuk Mesir dalam pernyataannya mengatakan bahwa tema sentral KTT adalah kerjasama bilateral dan pembangunan bersama komunitas bersama Cina-Afrika yang lebih kuat, dan bahwa tujuan utamanya adalah untuk mengintegrasikan Inisiatif pembangunan Tiongkok dengan inisiatif negara-negara Afrika. Tiongkok positif tentang *Egypt Vision 2030* Mesir dan mengklaim bahwa Tiongkok dan Mesir memiliki peluang signifikan untuk kerja sama strategis. Yang memiliki Visi yang bertujuan untuk pembangunan dan perlindungan lingkungan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan mempromosikan pembangunan ekonomi Mesir, sehingga mengarah ke negara maju yang baik dalam kreativitas, menekankan pada penyediaan lapangan pekerjaan dan pembangunan berkelanjutan (Dong, 2018).